



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

**NOMOR : W13-A7/994/HK.00.5/SK/3/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN  
TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pegawai dan budaya tertib dan agar berhasil guna perlu menetapkan penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2023;
  2. Bahwa sehubungan adanya mutasi dan penambahan hakim Pengadilan Agama Lamongan perlu adanya penunjukan kembali Hakim Pengawas Bidang yang melaksanakan pengawasan sebagaimana uraian tugas tahun 2023;
  3. Bahwa demi lancarnya tugas pengawasan dan mengurangi beban tugas para Hakim Pengawas Bidang perlu dilakukan pemerataan tugas pengawasan di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor RI. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Penetapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 094 Tahun 2012 tentang Hak-Kepuasan dan Fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai negeri Sipil di

Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (wistleblowing system) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 145/KMA /SK/ VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan ;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 16 Maret 2007 Nomor : 71/SEK/01/III/2007;  
2. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-W13-A7/ 0172 /HK.00.5/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Lamongan;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-A7/994/HK.00.5/SK/3/2023 tanggal 10 Maret 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini;
- Ketiga : Membantu Ketua Pengadilan Agama Lamongan Melaksanakan Pengawasan pada unit-unit Kerja di Kepaniteraan, di Kesekretariatan manajemen peradilan dan Pelayanan Publik;
- Keempat : Masing-masing Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan Pengawasan agar terjun ke unit-unit kerja sebagaimana petunjuk instrument Tata Laksana Pengawasan Buku IV Mahkamah Agung RI;
- Kelima : Apabila Hakim Pengawas Bidang menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk operasional perlu dicatat sebagai temuan yang perlu ditindak lanjuti dan perbaikan oleh masing-masing unit kerja di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;

- Keenam : Melakukan Kontrak agar segera adanya perbaikan hasil temuan dengan target waktu kepada Pejabat unit Kerja di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan;
- Ketujuh : Melaporkan hasil Pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan 3 bulan sekali pada setiap akhir semester pada tahun 2023;
- Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Lamongan  
Pada tanggal: 10 Maret 2023  
Ketua



**Drs. Murdani, S.H.**

NIP. 19671231 199403 1 052

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan.  
 Nomor : W13-A7/994/HK.00.5/SK/3/2023  
 Tanggal : 10 Maret 2023

**DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG  
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2023**

NO	BIDANG PENGAWASAN	SUB BIDANG PENGAWASAN	NAMA HAKIM PENGAWAS BIDANG	URAIAN TUGAS PENGAWASAN
1	2	3	4	5
1.	Koordinator Hakim Pengawas Bidang;		HUSNAWATI, S.Ag., M.Sy. Pembina Utama Muda, IV/c Wakil Ketua/Hakim Madya Utama NIP. 197111181998032002	1. Memerintahkan Hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan; 2. Menerima Laporan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang; 3. Melakukan Rapat Evaluasi hasil Pengawasan; 4. Melaporkan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada ketua;
2.	Bidang Manajemen Peradilan		Drs. M. Sakdulloh Pembina Utama Madya, IV/d Hakim Utama Muda NIP. 196410311993031002	1. Progam kerja 2. Pelaksanaan/pencapaian target; 3. Pengawasan dan Pembinaan; 4. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan 1. Kendala dan Hambatan; 2. Faktor-faktor Pendukung; 3. Evaluasi Kegiatan;
3.	Bidang Kinerja Pelayanan Publik		Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. Pembina Utama Madya, IV/d. Hakim Utama Muda NIP. 196810051993032002	1. Pengelolaan Manajemen; 2. Mekanisme Pengawasan; 3. Kepemimpinan; 4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya manusia; 5. Pemeliharaan/perawatan inventaris;

				<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Tingkat Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian;</li> <li>7. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;</li> <li>8. Tingkat Pengaduan masyarakat;</li> <li>9. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan</li> </ul>
4.	Bidang Administrasi Umum	Administrasi Umum dan Keuangan	<p><b>Dra. Hj. Munajat, M.H.</b>  Pembina Utama Muda, IV/c  Hakim Madya Utama  NIP. 197011131994032001</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tata persuratan arsip Dinamis;</li> <li>2. Investaris dan Pemeliharaan Barang Milik Negara;</li> <li>3. Mekanisme pelaksanaan serta Realisasi Anggaran Belanja Modal, Pengelolaan Perpustakaan Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA;</li> <li>4. Pelaporan SAKPA, SIMAK-BMN dan Kegiatan IT;</li> <li>5. Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Barang dan Modal;</li> <li>6. Pelaksanaan dan Realisasi serta Pelaporan Penyerapan Anggaran DIPA tahun 2023;</li> <li>7. Administrasi dan Pelaksanaan PNBPN;</li> <li>8. Administrasi Pengelolaan Biaya Proses Perkara;</li> <li>9. Pelaksanaan Penerimaan dan Realisasi Remunerasi;</li> <li>10. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan.</li> </ul>
		Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	<p><b>Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.</b>  Pembina Utama Madya, IV/d  Hakim Utama Muda  NIP. 196112101991032002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengecek Absensi Pegawai;</li> <li>2. Mengkoordinir Pembuatan SKP;</li> <li>3. Pembuatan DUK dan BEZZETING;</li> <li>4. Laporan Tri wulan;</li> <li>5. Pengelolaan Buku Induk dan File Pegawai;</li> <li>6. Pelaksanaan dan Realisasi Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2021;</li> <li>7. Permohonan pembuatan KARPEG, KARSU/KARSU, TASPEN;</li> <li>8. Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala;</li> <li>9. Inventaris dan Analisis Jabatan;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai;</li> <li>11. Pelaksanaan dan Penataan SIKEP MARI dan ABS Badilag;</li> <li>12. Mengelola Aplikasi SAPK.</li> <li>13. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan</li> </ul>
	Administrasi Perencanaan TI dan Pelaporan	<p><b>Drs. H. Ramly Kamil, M.H</b> Pembina Utama Madya, IV/d Hakim Utama Muda NIP. 196409121994031002</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelancaran akses internet;</li> <li>2. Pengelolaan situs resmi (website) dan email;</li> <li>3. Ketersediaan menu-menu website dan berita;</li> <li>4. Melakukan pengumpulan, pelaporan dan penelahan data / informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika serta identifikasi, analisa, pengelolaan dan penyajian data / informasi;</li> <li>5. Menyimpan rencana penyusunan rencana kegiatan anggaran kementerian/lembaga;</li> </ul>
		<p><b>H. Roihan, S.H.</b> Pembina Utama Muda, IV/c Hakim Madya Utama NIP. 196112291985031003</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat daftar rencana proyek dan daftar rencana kegiatan anggaran kementerian/lembaga;</li> <li>2. Merencanakan Penggunaan dana dari DIPA;</li> <li>3. Membuat daftar rencana kerja dan anggaran dilengkapi RAB (Rincian Anggaran Biaya) Serta data pendukung untuk anggaran tahun berikutnya:</li> <li>4. Melakukan Penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja;</li> <li>5. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>

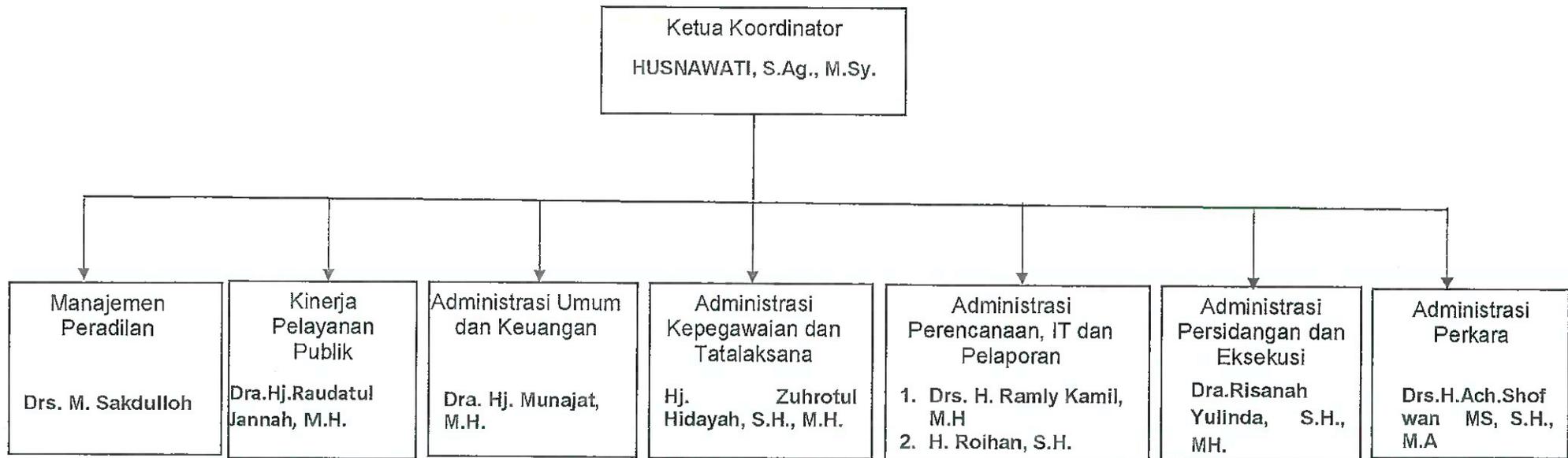
				pelaksanaan tugas. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil Pengawasan
5.	<b>Bidang Administrasi Persidangan dan Eksekusi</b>		<b>Dra. Risanah Yulinda, S.H., MH.</b> Pembina Utama Madya, IV/d Hakim Utama Muda NIP. 195907111984012001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pembagian berkas perkara;</li> <li>2. Penentuan PMH dan penunjukan PP dan JSP;</li> <li>3. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;</li> <li>4. Minutasi perkara;</li> <li>5. Pelaksanaan putusan dan ikrar talak;</li> <li>6. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.</li> </ol>
6.	<b>Bidang Administrasi Perkara</b>		<b>Drs.H. Ach. Shofwan MS, S.H.,M.A</b> Pembina Utama Muda, IV/c Hakim Madya Utama NIP. 196302101996031002	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penerimaan perkara pada tingkat pertama,</li> <li>2. Prosedur Penerimaan Permohonan Banding;</li> <li>3. Prosedur Penerimaan Permohonan, Kasasi;</li> <li>4. Prosedur Penerimaan Permohonan PK;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keuangan perkara</li> <li>2. Pemberkasan perkara dan kearsipan;</li> <li>3. Pelaporan;</li> <li>4. Memantau dan Mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan</li> </ol>

Lamongan, 10 Maret 2023  
Ketua Pengadilan Agama Lamongan

  
**Drs. Murdani, S.H.**  
 NIP. 19671231 199403 1 052

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan.  
Nomor : W13-A7/994/HK.00.5/SK/3/2023  
Tanggal : 10 Maret 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN**



Lamongan 10 Maret 2023  
Ketua Pengadilan Agama Lamongan

**Drs. Murdani, S.H.**  
NIP. 19671231 199403 1 052